

PENGEMBANGAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN BARAT

CB Herman Edyanto

Pusat Teknologi Sumberdaya Lahan Wilayah dan Mitigasi Bencana
TPSA - BPPT

Abstract

International boundary between two state is an important place where the local resident's activities are executed. The differences between two countries in the border area include several aspects such as national income per capita which about on frequently give different life colour also among frontier society and social education. The fact is that the social and economic life of Indonesian frontier society are more influenced by requirement and culture of society of Malaysia. The government of Indonesia nowadays attempts to be able to build national program and develop economic activities for frontier society in West Kalimantan Province among others establishing industries and work along with government of Malaysia

Kata Kunci : Kawasan perbatasan, Temajok – Aruk, kawasan, masyarakat, pengembangan ekonomi, pengembangan

1. PENDAHULUAN

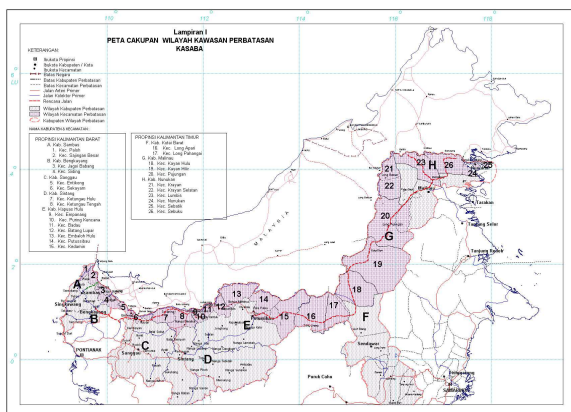
Berdasarkan Rakeppres Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan yang sedang pada tahap penyelesaian dalam Perbatasan Negara di Pulau Kalimantan ditetapkan 10 (sepuluh) Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) yaitu KPE Temajok-Aruk dengan pintu gerbang Aruk, KPE Jagoi Babang dengan pintu gerbang Jagoi Babang, KPE Entikong dengan pintu gerbang Entikong, KPE Jasa dengan pintu gerbang Jasa, KPE Nanga Badau dengan pintu gerbang Nanga Badau di Propinsi Kalimantan Barat dan KPE Long Apari-Long Pahangai dengan pintu gerbang Lasan Tuyan, KPE Long Nawang dengan pintu gerbang Long Nawang, KPE Long Midang dengan pintu gerbang Long Midang, KPE Simanggaris dengan pintu gerbang Simanggaris dan KPE Nunukan-Sebatik dengan pintu gerbang Nunukan di Propinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Rakeppres Rencana tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan, Kawasan Pengembangan Ekonomi merupakan kawasan yang ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- Diperuntukan sebagai pemelihara keamanan dan pertahanan negara; dan atau
- Merupakan pusat atau pangkalan pertahanan

- Diperuntukan untuk menjamin keutuhan wilayah nasional; dan atau
- Kegiatan ekonomi didalamnya memanfaatkan sumber daya alam yang strategis; dan atau
- Kegiatan ekonomi di dalamnya me manfaatkan teknologi tinggi; dan atau
- Merupakan kawasan pengembangan ekonomi berskala besar dalam kegiatan industri, pariwisata, dll; dan atau
- Dapat mempercepat terwujudnya struktur tata ruang nasional; dan atau
- Merupakan perlindungan produksi pangan nasional (ketahanan pangan nasional); dan atau
- Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat-istiadat serta budaya nasional; dan atau
- Merupakan tempat perlindungan sumber daya nasional; dan atau
- Merupakan cagar alam bagi perlindungan flora dan atau fauna sebagai asset nasional yang hampir punah atau diperkirakan akan punah; dan atau
- Merupakan tempat perlindungan tata air yang setiap tahun menimbulkan kerugian negara; dan atau
- Merupakan tempat perlindungan iklim makro

Kondisi perekonomian kawasan Pengembangan Ekonomi di Kalimantan-Serawak-Sabah yang umumnya masih sangat lemah menyebabkan kawasan ini juga ditetapkan sebagai Kawasan Tertinggal. Keteringgalan ini berdampak sangat luas terutama dalam hal kesenjangan ekonomi antara penduduk Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Malaysia dengan segala dampak negatifnya, misalnya penjarahan kayu (*illegal logging*), TKI ilegal dan lain-lain, sehingga diperlukan strategi pembangunan yang tepat, guna mengatasi masalah kesenjangan ekonomi tersebut.



Peta 1 : Cakupan Wilayah Kawasan Perbatasan KASABA

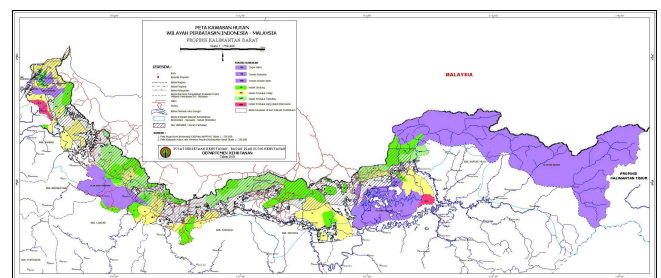
1.1. Pendekatan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE)

Pendekatan pengembangan KPE dilakukan dengan tiga aspek, yaitu :

- *Pendekatan Kesejahteraan*; dimana pendekatan yang dilakukan berdasarkan pengembangan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
- *Pendekatan Lingkungan*; yaitu pendekatan yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan meminimasi dampak yang akan ditimbulkann oleh kegiatan pembangunan.
- *Pendekatan Keamanan*, yaitu pendekatan yang memandang perbatasan sebagai kawasan yang bersebelahan langsung dengan negara lain sehingga perlu pengawasan terhadap keamanan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (lihat tabel 4).

1.2. Deliniasi Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE)

Pada konteks pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Temajok – Aruk Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi alat analisis untuk penetapan deliniasi ini antara lain adalah : faktor fisik, faktor sosial, sejarah, faktor perundang-undangan, faktor ekonomi, faktor pertahanan dan keamanan. Keseluruhan faktor dielaborasi ke dalam beberapa variabel dan indikator yang dapat dilihat pada **Tabel 1**. Analisis yang digunakan dalam penentuan deliniasi kawasan adalah metode deskriptif dengan pendekatan homogenitas aktivitas di Kawasan Pengembangan Ekonomi (lihat tabel 3).



Peta 2: Kawasan Hutan Wilayah Perbatasan Indonesia – Malaysia

2. BAHAN DAN METODE

2.1. Kebijakan Dan Strategi Spasial Pengembangan Kawasan Perbatasan KASABA

Salah satu program pembangunan daerah yang ditujukan untuk mempercepat pengembangan wilayah yang tertuang dalam Propenas (Program Pembangunan Nasional) 1999 – 2004 adalah program pengembangan daerah perbatasan. Tujuan yang ingin dicapai dalam program ini adalah

- Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan.
- Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan negara lain. Kebijakan spasial dan strategi pengembangan kawasan perbatasan KASABA (Kalimantan-Serawak-Sabah) meliputi beberapa hal yang dapat dilihat pada Tabel 1.

2.2. RTRW Propinsi Kalimantan Barat

Dalam kebijakan RTRW Propinsi Kalimantan Barat, Kawasan Temajok-Aruk dikategorikan sebagai kawasan tertentu. Di mana pada kebijakan kawasan tertentu adalah merupakan pengembangan kawasan tertinggal terutama di perbatasan untuk menunjang penguatan hankamneg, seperti yang terdapat di KPE

Temajok Aruk. Selain itu pula yang menjadi perhatian penting adalah penanganan lahan kritis di kawasan lindung serta pengembangan kawasan cepat tumbuh dan potensial melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada dengan orientasi ekspor. Secara umum kebijakan RTRW Propinsi yang menyangkut pengembangan KPE dapat dilihat pada tabel 1, sedangkan kebijaksanaan KPE dalam konteks RTRW Propinsi dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 1
Kebijakan Pengembangan
Kawasan Perbatasan Kasaba

Faktor	Kebijakan dan Strategi
Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan	Ditetapkan 10 kawasan pusat pertumbuhan ekonomi, salah satunya KPE Temajo Aruk yang dikembangkan untuk beberapa sektor unggulan seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Kehutanan - Perikanan - Pertanian - Perkebunan - Industri - Pariwisata
Struktur ruang kawasan perbatasan Kalimantan	Ditetapkan sistem pusat pertumbuhan pada kawasan perbatasan di Kabupaten Sambas berdasarkan fungsi kotanya, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - PKN: Aruk - PKW: Singkawang, Sambas, dan Temajok - PKL: Sajingan, Separan, Liku, Sekura, Galing, Pemangkat, Sentebang, Sejangkung, dan Kaliau - Kota di Serawak: Semantan, Biawak, Teluk Melano

Sumber: Kebijakan dan Strategi Spasial Pengembangan Kaw. Perbatasan Kalimantan-Sabah-Serawak, 2003

2.3. RTRW Kabupaten Sambas

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas merupakan penjabaran kebijaksanaan pembangunan regional Kalimantan Barat dan nasional yang harus dijadikan pedoman untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan pembangunan sektoral dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan (lihat tabel 2)

Berdasarkan kajian yang dilakukan maka beberapa kawasan strategis adalah :

- **Kawasan Biawak – Teluk Melano – Kuching** merupakan kawasan yang berada pada Negara Bahagian Sarawak - Malaysia. Kawasan ini merupakan potensi pasar yang cukup besar mengingat tingkat pendapat perkapita yang relatif lebih besar dibandingkan Kabupaten Sambas. Kota Biawak dan Teluk Melano merupakan pintu masuk perdagangan ke Sarawak.
- **Kawasan Natuna – Batam** merupakan dua KAPET yang telah berkembang di sebelah barat KPE Temajok Aruk. Kawasan inipun dapat dijadikan alternatif pasar bagi produk unggulan KPE Temajok Aruk.
- **Koridor Sambas-Pontianak** merupakan kawasan yang relatif lebih berkembang pada internal Propinsi Kalimantan Barat. Untuk pemasaran internal hasil KPE Temajok Aruk dapat dilakukan pada kawasan ini.
- **KPE Jagoi Babang** di Kabupaten Bengkayang merupakan KPE yang terdekat dengan KPE Temajok Aruk. Dengan KPE Jagoi Babang dapat dilakukan kerjasama mengingat komoditas unggulan relatif sama dengan KPE

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Kawasan Strategis (Eksternal)

Kawasan strategis merupakan beberapa kawasan yang berpengaruh atau dipengaruhi oleh adanya kebijakan pengembangan maupun kawasan yang berpotensi berinteraksi KPE Temajok Aruk.

Temajok Aruk, yaitu industri pertanian, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan.

- *KPE Entikong* merupakan kawasan yang memiliki potensi dan sektor unggulan yaitu industri, perkebunan, dan pertanian. Apabila dibandingkan dengan KPE Tamajok Aruk, yaitu sektor perkebunan.
- *KPE Nanga Badau* merupakan kawasan yang memiliki potensi dan sektor unggulan yaitu perkebunan, kehutanan, pertambangan, kehutanan, dan industri pertanian. Apabila melihat KPE Temajok Aruk sebagai patokan, maka terdapat kemiripan sektor unggulan, yaitu sektor perkebunan dan kehutanan.
- *KPE Jasa* merupakan kawasan yang memiliki potensi dan sektor unggulan yaitu perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. KPE ini juga mirip dengan KPE Temajok Aruk, yaitu kemiripan pada sektor unggulan, perkebunan, dan kehutanan.

Apabila melihat dari beberapa fungsi yang ada di beberapa KPE yang ada di sekitar KPE Temajok Aruk, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

- a. Keseluruhan KPE memiliki sektor strategis yang sama yaitu perkebunan (KPE Jagoi Babang, KPE Entikong, KPE Nanga Badau, KPE Jasa)
 - b. Hubungan antara KPE Temajok Aruk dengan kota-kota utama seperti Biawak, Natuna-Batam-Sambas lebih merupakan hubungan perdagangan dan jasa.
- Persamaan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh beberapa KPE membawa beberapa konsekuensi seperti :
- a. Eksploitasi terhadap sumber daya alam terutama hutan merupakan sektor utama, sehingga dapat beresiko terhadap lingkungan hidup sehingga diperlukan suatu penanganan kehutanan, yang dapat berupa *forestry management* (manajemen kehutanan) agar dapat meminimalkan dampak negatif.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana kolektor hasil produksi kehutanan dan perkebunan yang dimulai dari inlet (gudang penampungan, pabrik pengolahan, dll), jalan, dan outlet (pelabuhan, pergudangan *loading*, dll) yang dibuat secara searah.

Bila didasarkan pada Rakeppres RTR Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan, maka hirarki sistem pusat permukiman di perbatasan

Kalimantan Barat terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kota-kota yang termasuk ke dalam kategori tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. PKN : Temajok-Aruk, Jagoi Babang, Jasa, Entikong, Nanga Badau
- b. PKW: Sambas dan Temajok
- c. PKL : Saringan, Liku, Galing, Sejangkung, Sekura, dan Pemangkat

3.2. Analisis Keterkaitan Internal

A. Keterkaitan Antar Kecamatan

Berdasarkan RTRWK Sambas tahun 2001, struktur tata ruang kabupaten dibagi menjadi 4 Wilayah Pengembangan dimana kawasan Temajo-Aruk terlayani oleh dua WP, yaitu WP Sekura dan WP Galing. WP Sekura terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Keramat dan Paloh. Pusat pengembangan WP ini adalah Kota Sekura. Subpusat pengembangan WP ini adalah Kota Liku. Desa Tanah Hitam, dan Desa Semantir. Sedangkan WP Galing, terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Galing dan Saringan Besar. Pusat pengembangan WP ini adalah Kota Galing. Subpusat pengembangan WP ini adalah Kota Kaliau dan Desa Senatab. Untuk kota Liku, fungsi yang diemban oleh kota di kecamatan Paloh ini adalah fungsi administrasi. Sedangkan kota Kaliau memiliki fungsi yang sama dengan Kota Liku, sehingga kaitan kedua kota kecamatan ini dengan wilayah studi yang dimaksud yaitu masing-masing Temajo di Kecamatan Paloh dan Aruk di Kecamatan Saringan Besar adalah sebagai pusat administrasi dan penggerak perkembangan perekonomian wilayah.

B. Keterkaitan Desa-Kota

Kecamatan Paloh memiliki 6 (enam) desa utama yaitu desa Sebusus. Desa lainnya termasuk ke dalam orde IV.

Untuk kawasan Temajo, dusun yang terdekat adalah Camar bulan. Sedangkan untuk kawasan Aruk, dusun yang terdekat adalah Aping dan Beruang. Di Serawak dan Desa Aruk berorientasi dengan Desa Biawak di Serawak. Temajo berorientasi dengan Desa Telok Melano.

3.3. Hasil Dan Pembahasan Analisis Perekonomian KPE

Berdasarkan atas dasar harga berlaku, PDRB per kapita Kalbar pada tahun 2001 mencapai Rp 5.104.733,97 dan atas dasar harga konstan 1993 mencapai Rp 1.943.417,47 sedangkan untuk PDRB perkapita Kabupaten Sambas atas dasar harga berlaku pada tahun yang sama hanya mencapai Rp 4.255.322,45 dan atas dasar harga konstan 1993 sebesar Rp 1.454.584,58.

Pada Tahun 2001 kontribusi sektor pertanian memiliki angka yang terbesar

dibanding 9 sektor lainnya dalam distribusi PDRB, sebesar 39,98% (ADHB) dan 32,15% (ADHK 1993). Diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran mencapai angka 29,85% (ADHB) dan 30,27% (ADHK 1993) pada tahun yang sama. Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi sebesar 10,90% (ADHB) dan 16,55 (ADHK 1993). Sektor-sektor lainnya memiliki angka kontribusi di bawah 10%, seperti Pertambangan dan Penggalian, Listrik dan Air Minum, Listrik dan Air Minum, Bangunan, Pengangkutan dan Transportasi, Keuangan, persewaan, dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa.

Tabel 2
Kebijakan Tata Ruang Kabupaten Sambas

No	Sub Bidang Pengembangan	Kebijakan
1	Tata Jenjang pusat-pusat pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Kota orde I (Pusat Utama): <ul style="list-style-type: none"> Kota Sambas yang melayani Kec Sambas, Sejangkung, Teluk Keramat, Paloh, Sajingan Besar, Galing, dan Subah Pemangkat yang melayani Kec Pemangkat Selakau, Tebas, dan Jawai Kota orde II: <ul style="list-style-type: none"> Kota Tebas yang melayani Kec Tebas dan beberapa desa di Kec Jawai Kota Sekura yang melayani Kec Sekura dan beberapa desa di Kec Paloh Kota Galing yang melayani Kec Galing dan beberapa desa di Kec Sajingan Besar Kota Orde III: Kota Selakau, Sentabang, Sejangkung, Liku, Kaliau, dan Balai Gemuruh; jangkauan pelayanan meliputi wilayah kec masing-masing.
2	Fungsi-fungsi pusat pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Sambas, berfungsi sebagai Pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa, simpul transportasi regional, pusat koleksi dan distribusi skala kecamatan, pusat pemerintahan kecamatan Galing berfungsi sebagai simpul transportasi regional, pusat koleksi dan distribusi skala kecamatan, pusat pemerintahan kecamatan Sejangkung berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan
3	Pola perwilayahan	<ul style="list-style-type: none"> WP Pemangkat dengan pusat Pemangkat, mencakup Kec Selakau, Pemangkat, Tebas, dan Jawai WP Sambas dengan Pusat Sambas, mencakup Kec Sambas, Sejangkung, dan Subah WP Sekura dengan pusat Sekura, mencakup Kec Teluk Keramat dan Paloh WP Galing dengan pusat Galing mencakup Kec Galing dan Sajingan Besar

Sumber: RTRW Kabupaten Sambas 2001-2010

Tabel 6
Perbandingan PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhannya Kab Sambas
Terhadap Kalimantan Barat Tahun 1997-2001

Th	Kab Sambas		Kalimantan Barat	
	Berlaku	Konstan 1993	Berlaku	Konstan 1993
97	1.644.867,30	1.139.931,71	2.830.795,80	2.005.157,39
98	2.869.132,92	1.154.771,79	3.998.652,15	1.879.592,36
	(74,43)	(1,30)	(41,26)	(-6,26)
99	3.004.691,28	1.218.419,35	4.412.296,24	1.911.695,07
	(4,72)	(5,51)	(10,34)	(1,71)
00	3.787.295,08	1.407.024,24	4.790.495,6 1	1.939.322,1 6
	(24,39)	(15,48)	(8,57)	(1,44)
01	4.255.322,45	1.454.584,58	5.104.733,97	1.943.417,47
	(12,36)	(3,38)	(6,56)	(0,21)

Sumber: Pendapatan Regional Kecamatan Kabupaten Sambas 1997-2001

Keterangan : () Laju Pertumbuhan

- PDRB Per kapita (Rupiah)

- Laju Pertumbuhan (persen)

Tabel 7
Distribusi Persentase PDRB
Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997-2001

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		1997	1998	1999	2000	2001
1	Pertanian	35,63 34,29	45,00 34,42	41,86 34,41	40,51 34,29	39,98 32,15
2	Pertambangan dan Penggalian	0,29 0,25	0,23 0,22	0,22 0,21	0,23 0,23	0,09 0,19
3	Industri Pengolahan	13,51 14,52	8,78 15,06	10,89 16,37	11,34 17,01	10,90 16,55
4	Listrik dan Air Minum	0,32 0,29	0,23 0,31	0,24 0,34	0,33 0,44	0,38 0,41
5	Bangunan	2,33 2,47	2,52 2,36	2,50 2,13	2,72 2,20	2,82 2,13
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	31,55 29,72	30,31 29,89	31,09 30,41	30,56 30,73	29,85 30,27
7	Pengangkutan dan Transportasi	6,36 7,47	4,09 7,04	3,77 6,04	3,84 6,32	4,14 6,23
8	Keuangan, persewaan, dan Jasa Perusahaan	5,56 6,20	4,65 6,05	5,16 5,52	5,90 5,93	5,90 5,97
9	Jasa-jasa	4,47 4,79	4,20 4,64	4,27 4,58	4,56 4,85	5,94 6,09

Sumber : Pendapatan Regional Kecamatan Kabupaten Sambas 1997-2001

Ket:

baris 1 → Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

baris 2 → Atas Dasar Harga Konstan 1993(ADHK 1993)

Indeks LQ dapat digunakan untuk menggali sektor-sektor potensial Kabupaten Sambas untuk melihat sektor basis yang berorientasi ekspor. Sektor-sektor yang memiliki LQ lebih dari 1 yaitu sektor pertanian, dan sektor perdagangan, restoran & hotel. Secara teoritis, sektor yang memiliki nilai LQ lebih dari 1 merupakan sektor basis daerah yang diharapkan mampu dikembangkan lebih jauh dan memiliki peluang untuk ekspor, misalnya sektor pertanian terutama komoditi karet dan kelapa, serta beras di sub sektor tanaman bahan makanan. Sektor perdagangan, restoran, dan hotel juga memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di Kabupaten Sambas.

Angka ICOR menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) relatif akibat adanya investasi. Angka ICOR yang dianggap memiliki produktifitas investasi yang baik antara 3-4. Semakin tinggi nilai ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. Sebagai contoh tingkat kebutuhan investasi pada tahun 2010 untuk pencapaian nilai PDRB sebesar Rp.1.976.492,60 juta dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 9,09 % adalah sebesar Rp.718.652,71 juta atau sekitar 36 % dari nilai PDRB yang akan dicapai.

Dengan asumsi pola perekonomian Kab Sambas pada masa yang akan datang akan mengalami peningkatan yang cukup pesat dengan didukung oleh pelaksanaan otonomi daerah, maka diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas akan meningkat seperti sebelum adanya krisis ekonomi, yaitu sebesar 9,09%. Tetapi bila diasumsikan bahwa proses pemulihan perekonomian Kabupaten Sambas berlangsung secara lambat, maka diperkirakan LPE sekitar 5,23%. Sedangkan bila menggunakan skenario optimis, di mana proses pemulihan ekonomi berlangsung dengan baik yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang pesat, sehingga diperkirakan laju pertumbuhannya sekitar 13,83%. Dengan menggunakan asumsi tersebut dapat diketahui proyeksi nilai investasi sampai dengan tahun 2010.

Berdasarkan hasil analisis *Shift and Share*, sektor yang memiliki nilai *differential shift*-nya positif yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sektor tersebut memiliki kinerja kompetitif (dengan pengertian bahwa tingkat perkembangan sektor tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat propinsi) yang relatif lebih baik dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah lainnya. Sementara itu sektor yang memiliki nilai

proportional shift positif menunjukkan bahwa tingkat perkembangan sektor tersebut lebih cepat dibandingkan dengan wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Sektor tersebut adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa. Sebaliknya sektor yang memiliki nilai *proportional shift negatif*, menunjukkan bahwa tingkat perkembangan sektor tersebut lebih lambat dibandingkan dengan Propinsi Kalimantan Barat. (lihat tabel)

Berdasarkan hasil analisis LQ, menunjukkan bahwa sektor basis dari Kabupaten Sambas adalah sektor pertanian, di mana nilai koefisien dampak penggandanya adalah 12,16. Ini berarti bahwa untuk setiap nilai pendapatan pada sektor pertanian sebesar Rp.1,- akan membangkitkan pendapatan di sektor jasa/pelayanan (*service sector*) sebesar Rp.12,16,-.

4. SKENARIO PENGEMBANGAN KPE TEMAJOK-ARUK

Berbasis dari hasil penelitian di kawasan Temajok – Aruk tersebut maka disusun skenario pengembangan KPE Temajok – Aruk yaitu : “KPE Temajok-Aruk sebagai pusat perdagangan” yang didukung oleh dua pusat permukiman berpola node dan dua pusat permukiman berpola koridor (model moderate) berimplikasi pada :

- KPE Temajok-Aruk dikembangkan sebagai pusat kegiatan nasional di Kabupaten Sambas, artinya konsentrasi pengembangan akan terjadi pada dua titik
- Tingkat pertumbuhan ekonomi kawasan relatif cepat atau diperkirakan sebesar (2,9 % per tahun).
- Dibutuhkan investasi yang lebih besar untuk mendukung pengembangan pusat permukiman maupun infrastruktur kawasan.
- Membutuhkan dukungan transportasi darat yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas perhubungan antara KPE Temajok Aruk dengan wilayah Kabupaten Sambas lainnya maupun dengan Kawasan Sematan dan Biawak di Negara Bagian Sarawak - Malaysia.
- Pemerataan pembangunan semakin baik akibat terjadi penambahan pusat pelayanan, yaitu pusat permukiman di Temajo dan Liku, pusat permukiman koridor Galing Sejangkung, dan Kawasan Industri Aruk.
- Keseimbangan lingkungan perlu tetap dijaga mengingat alih fungsi lahan relatif semakin

besar sebagai akibat perkembangan dua pusat permukiman maupun aktivitas perkotaan.

5. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KPE TEMAJOK-ARUK

Kebijakan pengembangan KPE Temajok-Aruk mengindikasikan tujuan jangka panjang sebagai kerangka acuan tindakan di masa depan dan pengambilan keputusan. Sedangkan strategi merupakan tindakan yang mendukung setiap kebijakan dalam wujud aktivitas yang lebih spesifik dan terukur.

Untuk mengembangkan kebijakan dan strategi pengembangan KPE Temajok-Aruk diperlukan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- Pembangunan harus mempertimbang kan kondisi KPE Temajok Aruk : bentuk kota yang lebih bernilai maupun kondisi budaya masyarakat di KPE Temajok Aruk.
- Mendorong ekspansi kota dengan pembangunan perumahan baru pada empat pusat permukiman dengan tetap memperhatikan kawasan lindung dan permukiman transmigrasi.
- Lokasi untuk pembangunan baru : permukiman harus didukung oleh pembangunan infrastruktur baik pelayanan masyarakat, transportasi, air, listrik, dan komunikasi.
- Mengembangkan ekonomi inovatif berbasis pada sektor potensial (kelapa sawit) dan industri sebagai dasar pembangunan ekonomi KPE Temajok-Aruk.
- Kawasan di sekitarnya dikembangkan sebagai zona/wilayah penyangga sebagai daerah penghasil bahan untuk produksi (sumber bahan baku) maupun area yang bernilai lingkungan (kawasan lindung).
- Kota di sekitarnya dikembangkan sebagai kawasan permukiman yang terintegrasi agar pelayanan maupun penyediaan infrastruktur lebih efisien dan efektif khususnya sarana transportasi dan utilitas untuk pelayanan masyarakat.
- Perencanaan Tata Ruang KPE Temajok-Aruk lebih menekankan pada kebijakan yang menfokuskan pada pertumbuhan kota utama dengan dukungan transportasi regional. Pertumbuhan kawasan pertumbuhan dirancang menjadi kota berfungsi PKN yang akan merubah fungsi perdesaan menjadi perkotaan dan penyediaan perumahan bagi masyarakat pendatang (baru) di masa mendatang serta tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Kawasan pusat pertumbuhan harus dirancang sedemikian rupa agar perkembangan kota tidak memanfaatkan kawasan lindung.
- Pertumbuhan harus dikelola untuk menghasilkan bentuk kota yang memberikan pelayanan yang efisien sehingga penyediaan infrastruktur terutama transportasi menjadi kunci utama dalam mendukung proses pembangunan.
- Langkah penting untuk jangka panjang, pertumbuhan KPE Temajok Aruk harus ditunjang dengan langkah menjaga meminimalisasi tekanan lingkungan terutama area disekitar pusat kota maupun membantu produktivitas wilayah penyangga (kawasan-kawasan perdesaan).
- Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan harus tetap dalam kerangka NKRI. Pengelolaan perbatasan dan keamanan yang lebih baik menjadi faktor utama dalam mengembangkan KPE Temajok Aruk.

Tabel 8
Location Quotient (LQ) Kabupaten Sambas
Terhadap Propinsi Kalimantan Barat Menurut
Sektor Tahun 2004

No	Sektor / Lapangan Usaha	Peranan Sektoral (%)		LQ
		Kalbar	Kab Sambas	
1	Pertanian	24,06	32,15	
2	Pertambangan dan Penggalian	1,49	0,19	0,13
3	Industri Pengelolaan	18,84	16,55	0,88
4	Listrik, Gas dan Air Minum	1,00	0,41	0,41
5	Bangunan	6,24	2,13	0,34
6	Perdagangan, Restoran dan Hotel	19,46	30,27	1,56
7	Pengangkutan dan Komunikasi	10,35	6,23	0,60
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,00	5,97	0,85
9	Jasa-jasa	11,57	6,09	0,53

Sumber : Pendapatan Regional Kecamatan Kabupaten Sambas 1997-2001

6. KESIMPULAN

Kawasan pengembangan ekonomi membutuhkan strategi pengembangan yakni pengembangan sistem kota kota berpola node yaitu Kluster kota Liku, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan jasa, yang didukung oleh inlet dan outlet serta prasarana wilayah seperti pelabuhan, peningkatan jalan dan jembatan, dan sarana pelistrikan. Kluster Kota Galing, yang memiliki fungsi sebagai permukiman yang ditunjang dengan peningkatan jalan dan jembatan. Kluster Kota Sejangkung, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri ringan yang ditunjang dengan peningkatan jalan dan jembatan serta potensinya yakni berdekatan dengan kota Sambas. Kluster Kota Kaliau, yang memiliki fungsi sebagai pusat permukiman yang ditunjang oleh peningkatan jalan dan jembatan serta perbaikan sistem pertelekomunikasian.

Strategi lain adalah mengembangkan kluster Kota Temajo – Liku yang memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan jasa, industri dan pariwisata bahari, pertanian, pemerintahan, permukiman dan kegiatan pertahanan negara. Kluster kota Galing–Sejangkung yang memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan permukiman, pertanian, dan industri ringan. Kluster kota Kaliau – Aruk yang memiliki fungsi sebagai kegiatan jasa, industri, pertahanan negara, konservasi hutan, pertanian dan permukiman.

KPE perlu didukung oleh berbagai rencana yang akan mengisi struktur tata ruang wilayahnya yang mencakup : Rencana Struktur Sistem Transportasi, Rencana Jaringan Telekomunikasi dan Rencana Penyediaan Sarana dan Prasarana KPE.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pekerjaan Umum Rakeppres, 2004,
"RTR Kawasan Perbatasan Negara di
Kalimantan".
Departemen Pekerjaan Umum "Penyusunan

Strategi Pengembangan Kawasan
Perbatasan Negara Indonesia – Malaysia
(Kalimantan)". Jakarta, 2002.
Dirjen Penataan Ruang, Departemen
Permukiman dan Prasarana Wilayah 2001,"
Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wialyah
Kabupaten."